

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan layanan Google dapat menjadi model transisi digital kearsipan di instansi pemerintah sebelum implementasi penuh SRIKANDI. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi aktual pengelolaan arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa setelah peralihan dari aplikasi SIKD ke SRIKANDI, belum tersedia sistem khusus yang mengakomodasi arsip foto elektronik. Hal ini menimbulkan kekosongan sistem pengelolaan arsip foto, sehingga unit kearsipan menggunakan layanan Google Drive dan Google Spreadsheet sebagai alternatif penyimpanan sementara.
2. Pasca peralihan dari aplikasi SIKD ke aplikasi Srikandi, pengelolaan arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah menghadapi kendala serius karena tidak adanya fitur khusus untuk arsip foto. Kondisi ini berdampak pada hilangnya arsip foto periode 1971–2014 yang sebelumnya tersimpan dalam SIKD. Kondisi ini berakibat pada terhambatnya proses penyerahan arsip foto. Upaya penataan kembali baru dilakukan terhadap arsip foto periode 1971–1990, sementara arsip setelah periode tersebut belum sepenuhnya dikelola. Untuk menutupi kekosongan sistem pengelolaan arsip foto, Bappeda memanfaatkan Google Drive sebagai sarana penyimpanan sementara dan Google Spreadsheet sebagai instrumen pencatatan metadata. Pemanfaatan ini mempermudah pengelompokan arsip berdasarkan tahun kegiatan serta pencatatan deskripsi arsip, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek keamanan, autentisitas, dan prosedur kelembagaan.

3. Strategi yang dilakukan antara lain penataan folder berdasarkan kronologi dan nomor, pembatasan akses melalui akun resmi instansi, serta pencatatan metadata arsip dengan Google Spreadsheet dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021. Langkah ini membantu menjaga keteraturan, kemudahan temu kembali, dan aksesibilitas arsip. Namun, jika dikaitkan dengan standar ISO 15489-1:2016, pemanfaatan Google Drive masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip autentisitas dan integritas, karena tidak tersedia *hashing*, *sidik jari digital*, maupun SOP internal sebagai pedoman resmi. Google hanya menyediakan *version history* yang belum mampu memastikan keaslian arsip secara digital. Selain itu, dari sisi kelembagaan, belum adanya SOP khusus pengelolaan arsip foto karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini terjadi karena pengelolaan arsip foto belum diprioritaskan, Bappeda masih berfokus pada pengelolaan arsip dinamis tekstual sehingga Arsiparis hanya mengelola arsip sesuai dengan peraturan secara umum yang tidak secara khusus terkait pengelolaan arsip foto. Hal ini membuat praktik yang ada masih berjalan secara teknis tanpa dasar aturan internal yang baku. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip-prinsip kearsipan tersebut masih terbatas dan perlu diperkuat melalui penyusunan kebijakan, *Standar Operasional Prosedur* (SOP) internal, serta pengembangan sistem resmi seperti Srikandi yang sesuai dengan standar nasional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah:

1. Pemanfaatan Media Alternatif Sementara

Layanan Google Drive dapat tetap dimanfaatkan sebagai media penyimpanan alternatif sementara, mengingat layanan ini memiliki dukungan keamanan dasar serta fitur kolaborasi yang memudahkan pengelolaan arsip. Namun,

keterbatasan kapasitas penyimpanan gratis sebesar 15 GB perlu menjadi perhatian serius, karena dalam jangka panjang kapasitas tersebut tidak akan mampu menampung seluruh arsip foto yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyimpanan, baik dengan memanfaatkan layanan Google berbayar maupun menyediakan server internal yang dilengkapi mekanisme keamanan data dengan dukungan anggaran kelembagaan.

2. Penguatan Aspek Kelembagaan

Pemanfaatan layanan Google perlu disertai dengan pemantauan berkala dan penguatan aspek keamanan agar pengelolaan arsip lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, penting disusun pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pengelolaan arsip foto elektronik di lingkungan Bappeda, serta regulasi yang lebih jelas di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aturan kelembagaan ini akan membantu aparaturnya dalam melaksanakan proses penyimpanan, penataan, dan akses arsip foto secara lebih teratur sesuai dengan prinsip kearsipan.

3. Pengembangan Sistem Resmi

Untuk jangka panjang, diharapkan tersedia sistem khusus yang dirancang untuk mengelola arsip foto elektronik secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Pengembangan fitur dalam aplikasi kearsipan resmi pemerintah, seperti SRIKANDI, juga perlu dipertimbangkan agar mampu mendukung pengelolaan arsip foto. Dengan demikian, arsip foto tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga terjamin keberlangsungan, keteraturan, dan nilai gunanya sebagai memori kelembagaan.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya melihat pemanfaatan Google Drive, tetapi juga membandingkannya dengan layanan lain agar terlihat kelebihan dan kekurangannya. Kajian keamanan data juga perlu diperdalam, misalnya dengan meneliti risiko kebocoran atau akses tidak sah. Selain itu, penelitian mendatang penting untuk mengkaji peluang integrasi arsip foto ke dalam SRIKANDI yang saat ini masih belum tersedia fiturnya. Sebagai

tambahan, penelitian selanjutnya juga dapat diarahkan pada pengembangan aplikasi khusus arsip foto berbasis cloud yang lebih aman, terstruktur, dan sesuai kebutuhan instansi pemerintah.